

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN
2021 PASAL 30 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DALAM KERANGKA TURNKEY PROJECT TIONGKOK
DI PROVINSI RIAU**

Oleh: Meliana Fannisa

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study analyzes how the implementation of Government Regulation Number 34 of 2021, Article 30, concerning the Use of Foreign Workers from China in Riau Province. There has been an increase in the number of foreign workers working in Indonesia, with foreign workers from China in the first place. Therefore, the Indonesian Government often tries to make changes to government regulations related to foreign workers to adjust to existing conditions. Government Regulation Number 34 of 2021, Article 30, is one of the results of changes to regulations regarding the obligation of foreign worker employers to provide Indonesian language training to foreign workers.

This study uses a qualitative method, with data collection techniques through interviews and literature studies sourced from several books, journals, articles, and websites. This study uses the Neorealism perspective and Public Policy theory.

The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation Number 34 of 2021, Article 30, still requires further regulations so that guidance and supervision by related agencies can run.

Keywords: Bahasa Indonesia, China, Foreign Workers, Government Regulation

PENDAHULUAN

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO), jumlah Tenaga Kerja Asing di dunia mencapai 169 juta orang pekerja.¹ Salah satu kawasan yang memiliki arus migrasi tenaga kerja yang tinggi adalah Asia Tenggara. Indonesia yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memiliki 121.206 orang Tenaga Kerja Asing (TKA).² Di tahun 2019, dari 109.546 TKA yang terdaftar bekerja di Indonesia. TKA asal Tiongkok merupakan jumlah terbanyak, yaitu mencapai 42.624 dari total 109.546 TKA yang bekerja di Indonesia.³

Penggunaan TKA di Indonesia dimaksudkan untuk: (1) meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia Indonesia melalui alih keahlian dan pengetahuan agar dapat dikuasai dan dipahami dengan baik oleh TKI; (2) memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja ahli yang saat ini belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia; (3) peningkatan investasi asing; dan (4) memberikan sebuah kesejahteraan untuk Warga Negara Indonesia dalam menyeimbangkan Penggunaan TKA di Indonesia.⁴

¹ ILO. <https://www.ilo.org/topics/labour-migration#areas>

² Bidang Pengelolaan Ketenagakerjaan. 2023. Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD) edisi 2 Tahun 2023. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (Jakarta Selatan). 53-55

³ Jumlah Data Tka di Indonesia Periode Tahun 2019-2021. satudata.kemnaker.go.id. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/701>

⁴ Zainuddin M., Alfons SS., Soplantila R. Desember 2023. Op.cit.

Persyaratan bisa berbahasa Indonesia bagi TKA merupakan hal penting karena diharuskannya komunikasi antar-pekerja yang mayoritas orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jika TKA tidak dapat berbahasa Indonesia dapat menghambat proses alih keahlian dan pengetahuan yang merupakan salah satu alasan utama penggunaan TKA. Peraturan mengenai pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing ini juga dilakukan untuk menjunjung budaya dan Bahasa Indonesia di negara sendiri. Kemampuan TKA untuk menggunakan bahasa tempatnya bekerja dapat mempermudah TKA di luar dan di dalam lingkungan kerja. Pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasal tersebut berbunyi:⁵

“Pendidikan dan pelatihan bahasa indonesia kepada TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa indonesia”.

Pada Juli 2018, diterbitkan Peraturan Kemnaker Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA yang selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, dimana salah satu pasalnya mengatur tentang kewajiban pemberi kerja TKA untuk menyediakan pelatihan

⁵ Pemerintah Pusat, Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. LN.2021/No.44, TLN No.6646, jdih.setkab.go.id : 28 hlm. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161898/p-p-no-34-tahun-2021>

Bahasa Indonesia kepada TKA. Peraturan tersebut mengembalikan kewajiban berbahasa Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013⁶ dan dihapus dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015. Penghapusan berbahasa Indonesia bagi TKA menimbulkan protes dari berbagai akademisi dan praktisi serta tidak sejalan dengan rekomendasi ILO dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 33 menyatakan bahwa wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja dan mengikuti pembelajaran bagi yang belum mampu berbahasa Indonesia.⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibuat untuk membantu melaksanakan UU Cipta Kerja terkait kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA.

KERANGKA TEORITIS

Perspektif Liberalisme

Perspektif yang digunakan adalah Perspektif Liberalisme. Menurut Adam Smith, terdapat saling ketergantungan antara masyarakat dengan masyarakat antara negara dengan negara sebagai bagian dari *human nature*. Kaum liberal memandang sifat manusia

secara positif.⁸ Perspektif Neorealisme memiliki beberapa asumsi dasar, yakni;⁹ (1) negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, (2) negara menjamin kebebasan individu, (3) berpandangan positif tentang sifat manusia, (4) memaksimalkan peran individu dan aktor-aktor non negara, dan (5) kebebasan, kerjasama, kemajuan dan kesejahteraan.

Teori Kerja Sama Internasional

Negara pada hakikatnya tidak bias berdiri sendiri. Terjalannya sebuah kerjasama internasional merupakan akibat dari adanya perpaduan keanekaragaman masing – masing negara baik itu masalah nasional, regional maupun global yang memerlukan perhatian dan bantuan dari negara-negara yang lain. Kerjasama Internasional, yaitu bentuk dari hubungan yang dilakukan satu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan masyarakatnya. Kerjasama internasional dapat terjadi di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing Negara.¹⁰

Kerjasama internasional terdiri dari Kerjasama Bilateral, yaitu perjanjian yang hanya dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat *Treaty Contract*.; Kedua, Kerjasama

⁶ Japri M., Wijaya MDS. Desember 2023. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*. 6(2). 610-615. Hlm 612-613.

⁷ Pemerintah Pusat. 2009. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 57 hlm.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/27970/UU%20Nomor%2024%20Tahun%202009.pdf>

⁸ Dugis, Vinsensio. 2016. Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik). Surabaya:Cakra Studi Global Strategis. hlm 61

⁹ Jackson, Sorensen. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 175.

¹⁰ Ikbar, Yanuar. (2014). Metodologi & Teori Hubungan Internasional. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 273

Regional, yaitu perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara yang berada dalam satu kawasan dan bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*; dan ketiga, Kerjasama Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan negara-negara tanpa dibatasi oleh kawasan tertentu dan bersifat *Law Making Treaty*.¹¹ Adapun bentuk kerjasamanya yang dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama bilateral yang hanya dilakukan oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Tiongkok.

Teori Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik adalah seperangkat hukum, pedoman, dan tindakan yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk bekerja demi kepentingan publik.¹² Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Teori kebijakan publik seringkali berfokus pada bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks politik. Ini mencakup analisis aktor politik, proses pengambilan keputusan, dan pengaruh institusi politik.

Menurut Harold Lasswell, agenda Kebijakan Publik tidak lagi hanya ditentukan dan diartikan dalam ruang lingkup nasional.¹³ Terutama dalam era globalisasi dimana batasan negara dan isunya semakin kabur, kebijakan publik suatu negara dapat dipengaruhi oleh

dinamika internasional, dan sebaliknya.¹⁴ Teori kebijakan publik dapat membantu menganalisis bagaimana politik luar negeri dan domestik saling berinteraksi. Teori kebijakan publik memungkinkan untuk mengevaluasi dampak kebijakan tertentu terhadap hubungan internasional. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan tertentu mempengaruhi hubungan bilateral atau multilateral.¹⁵

Tingkat Analisis: Kelompok

Menurut Mohtar Mas'ood ada lima kategori yang penting untuk diketahui dalam menentukan tingkat analisis dalam sebuah studi hubungan internasional, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa dan sistem internasional.¹⁶ Pada penelitian ini tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat analisis kelompok. Dimana yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok yang terlibat dalam hubungan internasional. Adapun yang termasuk dalam kategori kelompok seperti kabinet, organisasi, birokrasi, departemen dan badan pemerintahan, dan sebagainya.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian

¹¹ *Ibid.*

¹² *ibid.* hlm 18

¹³ Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta:CAPS. hlm 63

¹⁴ *ibid.* hlm 67-68

¹⁵ *ibid.* hlm 65

¹⁶ Mas'ood, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Pustaka LP3ES. Hlm 40

¹⁷ *Ibid.* hlm 41

kualitatif, sumber data utama adalah meliputi ucapan, perilaku serta tulisan yang dapat menciptakan informasi data deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data dan analisis informasi dalam berbagai bentuk dan berfokus pada hal yang diteliti demi tujuan mencapai pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti.¹⁸ Penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara deskriptif.

Data dikumpulkan secara primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara dan kajian kepustakaan. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kuesioner disusun untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Dampak dari globalisasi, salah satunya adalah kaburnya batas-batas negara. Di dukung oleh perkembangan teknologi dan informasi, negara menjadi terikat satu sama lainnya. Tren penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan pengaruh dari globalisasi dalam sektor perekonomian global.²⁰

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan perusahaan. Perusahaan mencari tenaga kerja yang dapat memenuhi kualifikasi, baik itu berupa ilmu pengetahuan atau pun keterampilan khusus yang dibutuhkan perusahaan. Maka dari itu, banyak perusahaan yang mempekerjakan TKA untuk mengisi kekosongan posisi yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja domestic. Penggunaan TKA juga bertujuan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja domestik.²¹

Selain itu, proses *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) juga telah mempengaruhi jumlah TKA pada suatu negara, dimana perusahaan asing yang melakukan investasi dengan mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain.²² Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN, menjadi negara dengan TKA terbanyak setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah TKA di Indonesia mengalami lonjakan yang dapat dilihat di Grafik 1 di bawah.

Grafik 1²³

kerja Asing di Indonesia. LINO: Jurnal ilmu HUBungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. 1(1). 27-36. Hlm 28

²¹ Zainuddin M., Alfons SS., Soplantila R. Desember 2023. Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. Patimura Law Study Review. 1(2). 98 - 109. Hlm 100

²² Fosfuri, Motta, & Rønde (2001) dalam Khaldun R.I., Fita G.A., Utami ANF., Tahawa THB. 2020. Globalisasi, Ancaman dan Upaya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Domestik terhadap Serangan Tenaga

²³ Databoks. 2022. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2017-2022.

¹⁸ Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. Jurnal Harmonia. 11(2).173-176

¹⁹ Bungin, Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:Rajagrafindo Persada. Hlm 81

²⁰ Fosfuri, Motta, & Rønde (2001) dalam Khaldun R.I., Fita G.A., Utami ANF., Tahawa THB. 2020. Globalisasi, Ancaman dan Upaya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Domestik terhadap Serangan Tenaga



Provinsi Riau menempati posisi 10 besar provinsi yang menerima investasi asing di Indonesia pada tahun 2019-2023.²⁴ Hal ini menjadi salah satu alasan yang menjadikan Provinsi Riau berada dalam 10 besar provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah TKA terbanyak.²⁵ Seperti yang dapat dilihat di Tabel 2.1, angka TKA di Provinsi Riau mengalami fluktuasi di tahun 2019-2021. Salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19. Setelah itu, dari tahun 2021-2023, jumlah TKA yang terdaftar bekerja di Riau terus bertambah.

Provinsi Riau memiliki TKA yang berasal dari berbagai negara. Berdasarkan Grafik 2.3 di atas, negara pengirim TKA asing terbanyak menurut data tahun 2019-2023 dipegang oleh tiga negara berikut, yaitu Tiongkok, Malaysia, dan India. TKA asal Tiongkok yang terbanyak dalam daftar TKA yang

bekerja di Provinsi Riau.²⁶ PT. Indahklat Pulp & Paper Tbk. merupakan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau dengan TKA terbanyak di tahun 2021-2023.

Turnkey Project dan Hubungan Kerja Sama Indonesia dan Tiongkok

Tiongkok memiliki aliran investasi yang besar di Indonesia. Realisasi investasi Tiongkok melonjak drastis, menjadikan Tiongkok sebagai negara yang terbesar ke-3 yang melakukan penanaman modal asing di Indonesia, setelah dengan Singapura dan Jepang.²⁷ Tiongkok memiliki program ekonomi *Belt and Road Initiatives* (BRI) yang berdampak pada peningkatan skema investasi. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara penerima modal terbesar dari investor Tiongkok. Selama dekade terakhir, Tiongkok telah melakukan investasi besar-besaran di Indonesia melalui BRI, yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur dan pertambangan. Kerangka BRI telah memantapkan posisi Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Saat ini, terdapat tujuh puluh satu program terkait BRI dengan total nilai sebesar \$20,3 miliar.²⁸

Indonesia dan Tiongkok kemudian menandatangani nota kesepahaman terkait investasi

<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/ecde04ee51721e8/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>

²⁴ Badan Pusat Statistik. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg0MCMY/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>

²⁵ Kementerian Ketenagakerjaan RI. Ketenagakerjaan dalam data 2019-2023.

²⁶ Laporan TKA 2019-2023. *Op.cit* hlm 4

²⁷ Ibid. 201

²⁸ The Carnegie Endowment. Desember 2023. *How Has China's Belt and Road Initiative Impacted Southeast Asian Countries?*. <https://carnegieendowment.org/posts/2023/12/how-has-chinas-belt-and-road-initiative-impacted-southeast-asian-countries?lang=en>

Tiongkok di Indonesia pada 25-27 Maret 2015. Pemerintah Indonesia kemudian menyetujui pelaksanaan *turnkey project*, dimana seluruh proyek yang akan dilaksanakan di Indonesia menggunakan material dan tenaga kerja, mulai dari tenaga kerja ahli sampai buruh yang di datangkan dari Tiongkok, hal tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia.²⁹

PMA memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekonomi dan telah dibuktikan di berbagai benua di banyak negara. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan investasi untuk meningkatkan modal asing. Kesepakatan investasi menggunakan *turnkey project* sendiri sebenarnya bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan dalam pasal 42 hingga 49 bahwa adanya pembatasan penggunaan TKA guna menjaga kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, serta beberapa kebijakan lainnya. Pemerintah juga membatalkan ribuan Peraturan Daerah yang dinilai menghambat investasi. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013 tentang syarat kewajiban berbahasa Indonesia dihapuskan dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan.³⁰ Hal ini

tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Presiden meyakini dengan penghapusan sejumlah peraturan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Penghapusan dan perubahan peraturan ketenagakerjaan memberikan kemudahan bagi para investor asing, dimana investor tidak perlu memusingkan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA dan berkewajiban memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) bagi TKA yang berdomisili diluar negeri serta melakukan pekerjaan sekali selesai.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan TKA sudah diatur sejak tahun 1958 dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya. UU ini dibuat untuk mengatur peraturan yang diharapkan dapat membantu membuka dan menyerap tenaga kerja Indonesia.

Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menggantikan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya.³¹

²⁹ Syarifah Aini F. 2021. Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia. Skripsi. Hlm 8-9

³⁰ Japri M., Wijaya MDS. Desember 2023. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Collegium Studiosum Journal. 6(2). 610-615. Hlm 612-613.

³¹ Pemerintah Pusat. 2022. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta karya bertujuan untuk mengatasi ketidakjelasan dan mengatur ulang beberapa ketentuan. Selanjutnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Karya ditetapkan sebagai UU melalui UU nomor 6 tahun 2023.³²

Di dalam UU Cipta Karya banyak peraturan sebelumnya yang mengalami penyederhanaan. Pengesahan UU Cipta Kerja mempermudah proses izin masuk TKA. Sehingga kini, TKA hanya membutuhkan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) saja. Kemudian di Pasal 46 UU Nomor 13 Tahun 2003, TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur Keputusan Menteri. Di UU Cipta Kerja, dilakukan penghapusan pasal mengenai pembatasan jabatan untuk TKA di perusahaan Indonesia yakni Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³³

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibuat untuk membantu melaksanakan UU Cipta Kerja terkait kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA. PP Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>

³² Pemerintah Pusat. 2023. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

³³ Riza Fauziah Djazuli. 2021. Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Indonesia. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. 15(1). Hlm 4

Tenaga Kerja Asing juga mengatur berbagai hal dari perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif serta pelanggaran norma penggunaan TKA.³⁴

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur terkait kewajiban Pemberi Kerja TKA untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dijelaskan lebih lanjut pada Bab Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping Dan Tenaga Kerja Asing. Pasal tersebut berbunyi:³⁵

“Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia”.

Permenakertrans nomor 12 tahun 2013 mengatur bahwa TKA wajib dapat berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia

³⁴ Pemerintah Pusat, Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. LN.2021/No.44, TLN No.6646, jdih.setkab.go.id : 28 hlm. Hlm 1 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161898/p-p-no-34-tahun-2021>

³⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Loc cit* hlm 18

menjadi salah satu syarat yang perlu dimiliki oleh TKA yang akan bekerja di Indonesia. Kemudian, Permenakertrans nomor 12 tahun 2013 dicabut dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang sudah digantikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menghapus kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA dari Permenaker Nomor 12 Tahun 2013.³⁶ Disisi lain, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 33 menyatakan bahwa wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam lingkungan kerja dan mengikuti pembelajaran bagi yang belum mampu berbahasa Indonesia.³⁷

Terjadinya penghapusan dan penyederhanaan peraturan terkait perizinan TKA di Indonesia, berpengaruh dalam memperlancar arus masuk TKA ke Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung arus investasi dan kerja sama ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Meskipun begitu, kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA merupakan hal penting karena komunikasi yang lancar antar-pekerja yang mayoritas merupakan tenaga kerja domestik sangat diperlukan. Selain itu, ketidakmampuan berbahasa

Indonesia dapat menghambat proses alih ilmu pengetahuan dan keterampilan yang merupakan salah satu alasan utama penggunaan TKA di Indonesia.

Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mengatur ketentuan lebih lanjut terkait Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa pendidikan atau pelatihan Bahasa Indonesia dapat dilaksanakan oleh pemberi kerja atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan Bahasa Indonesia. Adapun lembaga pendidikan atau pelatihan Bahasa Indonesia yang dapat melakukan kerja sama dengan pemberi kerja harus memiliki paling rendah terakreditasi B.³⁸

Selain itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga mengatur terkait sanksi-sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja. Terdapat tiga jenis sanksi yang diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan, yaitu denda, penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA,

³⁶ Japri M., Wijaya Mds. Desember 2023. *Op.cit.*

³⁷ Pemerintah Pusat. 2009. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 57 hlm. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27970/UU%20Nomor%2024%20Tahun%202009.pdf>

³⁸ Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171228/permenaker-no-8-tahun-2021>. Hlm 32

dan/atau pencabutan Pengesahan RPTKA.³⁹

Penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA termasuk dalam ketentuan wajib yang harus diikuti oleh pemberi kerja TKA. Pemberi kerja TKA dalam mengajukan RPTKA diharuskan membuat pernyataan tentang komitmen mereka dalam menyediakan fasilitas pembelajaran Bahasa Indonesia dan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan. Maka dalam pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menjelaskan bahwa tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan TKA dengan sanksi administratif berupa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.⁴⁰

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok Di Provinsi Riau

PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk. mempekerjakan 85 orang, 84 orang, dan 66 orang TKA di tahun 2021, 2022, dan 2023 berurutan. TKA yang bekerja di PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk berasal dari berbagai negara, seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Malaysia,

Jerman, Taiwan.⁴¹ TKA asal Tiongkok merupakan mayoritas TKA yang dipekerjakan di PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk. Pada tahun 2021 terdapat 29 orang TKA asal Tiongkok dari 85 orang TKA yang bekerja di PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk.⁴² Angka tersebut bertambah menjadi 34 orang TKA asal Tiongkok dari 84 TKA di tahun 2022⁴³, dan turun menjadi 22 orang TKA asal Tiongkok dari 66 TKA pada tahun 2023.⁴⁴

Saat ditanyakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja, beliau menyampaikan bahwa di PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk Perawang memiliki bagian *Job Training* dimana PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk Perawang menyediakan fasilitas bagi pekerjanya untuk mendapat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi dan posisi. Salah satu pelatihan yang disediakan adalah pendidikan Bahasa Indonesia bagi TKA yang bekerja di PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk Perawang. Pendidikan Bahasa Indonesia bagi TKA yang dilaksanakan PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk Perawang dilakukan secara independen. PT. Indah Kiat Paper & Pulp Tbk Perawang tidak melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan Bahasa swasta. Menurut Pak Rudi, walaupun TKA memiliki pekerja pendamping TKA yang sudah disediakan oleh perusahaan, TKA yang dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia dapat menjadikan proses pekerjaan

³⁹ *Ibid.* hlm 36

⁴⁰ *Ibid.* hlm 40

⁴¹ Laporan TKA Tahun 2023. *Loc.cit* 20-27

⁴² Laporan TKA Tahun 2021. *Loc.cit* 17-22

⁴³ Laporan TKA Tahun 2022. *Loc.cit* 21-27

⁴⁴ Laporan TKA Tahun 2023. *Op.cit* 20-27

menjadi lebih lancar, serta mempermudah TKA untuk melakukan sosialisasi baik di dalam atau di luar lingkungan kerja.

Balai Bahasa Provinsi Riau merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek.⁴⁵ Sebagai upaya memfasilitasi penyelenggara lembaga BIPA, Balai Bahasa Provinsi Riau sendiri telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait model pembelajaran dengan pengajar dan pegiat Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA). Koordinator Tim Kerja BIPA Balai Bahasa Provinsi Riau,⁴⁶ Bapak Yalta menyatakan bahwa perusahaan pemberi kerja TKA atau TKA yang bekerja di Provinsi Riau belum pernah menjadi peserta dari sosialisasi dan bimbingan teknis BIPA yang diselenggarakan Balai Bahasa Provinsi Riau. Balai Bahasa Provinsi Riau sendiri tidak memiliki tugas dan tanggung jawab langsung untuk melakukan pengajaran Bahasa Indonesia kepada TKA baik secara langsung atau pun melalui perusahaan pemberi kerja TKA. Melalui Lembaga Pelatihan Bahasa, beliau mengharapkan materi hasil sosialisai dan bimbingan teknis dapat digunakan sebagai panduan untuk mengajarkan Bahasa Indonesia kepada TKA yang bekerja di Riau.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau memiliki

tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan pada ketentuan penggunaan TKA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemberi kerja TKA yang bertempat di Provinsi Riau sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimana pengawasan dilakukan oleh Kementerian dan/atau dinas yang bergerak di bidang ketenagakerjaan provinsi.⁴⁷

Sejak tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menerapkan sistem pengurusan TKA *online*. Sistem pelaporan online juga diterapkan pada dinas-dinas terkait ketenagakerjaan di daerah. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan, Bapak Andri, beliau menyebutkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau sudah tidak lagi melakukan kunjungan secara langsung ke perusahaan-perusahaan sejak sistem *online* di terapkan. Perusahaan mengirimkan laporan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau secara *online*. Hal ini berpengaruh terhadap komunikasi antara pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan pekerja perusahaan. Maka dari itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau tidak dapat lagi melakukan pengawasan secara langsung terhadap perusahaan pengguna TKA.

⁴⁵ Balai Bahasa Provinsi Riau. Visi dan Misi.

<https://balaibahasariiau.kemdikbud.go.id/visi-dan-misi/>

⁴⁶ Bapak Yalta, Koordinator Tim Kerja BIPA. Balai Bahasa Provinsi Riau. *Wawancara*. (Balai Bahasa Provinsi Riau Jl. Binakrida Pekanbaru, Mei 2025)

⁴⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Loc cit hlm 20

Disamping itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau tidak memiliki peran langsung dalam pembinaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada perusahaan dan/atau instansi pemberi kerja TKA. Meskipun terdapat aturan yang menyatakan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai pihak dinas terkait yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di daerah, Bagian Pengawasan Tenaga Kerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau hingga saat ini tidak diberikan tupoksi untuk menjalankan pembinaan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.⁴⁸

SIMPULAN

Meningkatnya jumlah negara maju menjadikan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai ciri dari pertumbuhan globalisasi ekonomi dunia. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi yang diminati oleh negara – negara maju.⁴⁹ Tiongkok memiliki program ekonomi *Belt and Road Initiatives* (BRI) yang berdampak pada peningkatan skema investasi. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi

negara Asia Tenggara penerima modal terbesar dari investor Tiongkok. Setelah Indonesia menyetujui nota kesepahaman dengan Tiongkok di tahun 2015, Tiongkok menerapkan pelaksanaan *Turnkey Project* dalam proyek-proyek kerja samanya di Indonesia.⁵⁰ PMA memang memiliki pengaruh terhadap TKA yang dapat masuk untuk bekerja di Indonesia, tetapi melalui *Turnkey Project* jumlah TKA asal Tiongkok di Indonesia secara langsung meningkat yang ada dalam suatu negara.⁵¹

PMA berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di berbagai benua di banyak negara. Pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi investasi untuk meningkatkan modal asing. Meskipun tidak terdapat pernyataan secara langsung, sejak bertambahnya intensitas kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dan penandatanganan nota kesepahaman terkait pelaksanaan *Turnkey Project*, telah dilakukan beberapa kali penghapusan dan perubahan pada Undang – Undang dan Peraturan Tentang Ketenagakerjaan dan Investasi Asing demi meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Penghapusan dan perubahan peraturan ketenagakerjaan memberikan kemudahan bagi para investor asing, dimana investor tidak perlu memusingkan wajib berbahasa Indonesia bagi TKA dan berkewajiban memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA (Izin

⁴⁸ Bapak Andri. Pengawasan Tenaga Kerja. Wawancara. (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Jl Pepaya, Pekanbaru, Mei 2025)

⁴⁹ Juwita, Melda R, dkk. Juli-Desember 2020. Potentials and Challenges of Chinese Foreign Direct Investment in Indonesia. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu social dan Keagamaan Islam. 17(2). 195-217. Hlm 196

⁵⁰ Syarifah Aini F. 2021. Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok Terhadap Perekonomian Indonesia. Skripsi. Hlm 8-9

⁵¹ Fosfuri, Motta, & Rønde (2001) dalam Khaldun R.I., Fita G.A., Utami ANF., Tahawa THB. *Loc.cit*

Menggunakan Tenaga Kerja Asing) bagi TKA yang berdomisili diluar negeri serta melakukan pekerjaan sekali selesai.

Terkait kewajiban berbahasa indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013⁵² dan dihapus dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, saat ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 pasal 30 mengatur tentang kewajiban pemberi kerja TKA untuk menyediakan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Riau terhadap TKA asal Riau untuk tahun 2021-2023 masih dilaksanakan secara mandiri oleh pemberi kerja TKA tanpa pembinaan dan pengawasan dari instansi pemerintah terkait.

Proses *monitoring* Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 30 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau belum dapat terlaksana karena kurangnya peraturan sehingga tidak adanya indikator yang jelas dan menghasilkan proses pengawasan yang tidak berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

⁵² Japri M., Wijaya MDS. Desember 2023. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Collegium Studiosum Journal. 6(2). 610-615. Hlm 612-613.

- Abdoellah, AY., Rusfiana, Y. 2016. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Dugis, Vinsensio. 2016. Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik). Surabaya:Cakra Studi Global Strategis.
- Jackson, Sorensen. 2013. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Septiana, dkk. 2023. Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi. Padang:PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta:CAPS.

Jurnal

- Arinda Milahayu Indraswari Anny. 2025. Analisis Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Tenaga Kerja dalam Konteks *Free Flow of Services* dan *Skilled Labour* dalam Kerangka ASEAN *Economic Blueprint*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. 3(1).
- Fosfuri, Motta, & Rønde (2001) dalam Khaldun R.I., Fita G.A., Utami ANF., Tahawa THB. 2020. Globalisasi, Ancaman dan Upaya Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Domestik terhadap Serangan Tenaga kerja Asing di Indonesia. LINO: Jurnal ilmu HUBungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. 1(1). 27-36.
- Japri M., Wijaya MDS. Desember 2023. Kewajiban Penggunaan

- Bahasa Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*. 6(2). 610-615. Hlm 612-613.
- Riza Fauziah Djazuli. 2021. *Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Indonesia*. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. 15(1).
- Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Jurnal Harmonia*. 11(2).173-176
- Zainuddin M., Alfons SS., Soplantila R. Desember 2023. Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *Patimura Law Study Review*. 1(2). 98 - 109.
- Laporan**
- Bidang Pengelolaan Ketenagakerjaan. 2023. *Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD) edisi 1 Tahun 2023*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (Jakarta Selatan).
- Bidang Pengelolaan Ketenagakerjaan. 2023. *Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD) edisi 2 Tahun 2023*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (Jakarta Selatan). 53-55
- Bidang Pengelolaan Ketenagakerjaan. *Ketenagakerjaan Dalam Data (KDD) edisi 2 Tahun 2023*.
- Bapak Yalta, Koordinator Tim Kerja BIPA. Balai Bahasa Provinsi Riau. *Wawancara*. (Balai Bahasa Provinsi Riau Jl. Binakrida Pekanbaru, April dan Mei 2025)
- Bapak Rudi. *Wawancara*. (Kantor PT. Indahklat Pulp&Paper TBK Jl Teuku Umar, Pekanbaru, Mei 2025)
- Bapak Andri. Pengawasan Tenaga Kerja. *Wawancara*. (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Jl Pepaya, Pekanbaru, Mei 2025)
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. 2020. Laporan TKA Tahun 2019
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. 2021. Laporan TKA Tahun 2020
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. 2024. Laporan TKA Tahun 2023.
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. 2023. Laporan TKA Tahun 2022.
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. 2022. Laporan TKA Tahun 2021.
- ILO. 2007. *International Labour Standards on Migrant Workers' Rights: Guide for Policymakers and Practitioners in Asia and the Pacific*. Bangkok, International Labour Office.
- Jumlah Data Tka di Indonesia Periode Tahun 2019-2021.
- Web**
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistik-ics-table/2/MTg0MCMY/realisasi-investasi-penanaman-modal->

- [luar-negeri-menurut-provinsi.html](#)
- Balai Bahasa Provinsi Riau. Visi dan Misi.
<https://balaibahasariau.kemdikbud.go.id/visi-dan-misi/>
- Databoks. 2022. Tenaga Kerja Asing di Indonesia Tahun 2017-2022.
<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/ecde04ee51721e8/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>
- ILO.
<https://www.ilo.org/topics/labour-migration#areas>
- Jumlah Data Tka di Indonesia Periode Tahun 2019-2021.
satudata.kemnaker.go.id.
<https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/701>
- The Carnegie Endowment.
Desember 2023. *How Has China's Belt and Road Initiative Impacted Southeast Asian Countries?*.
<https://carnegieendowment.org/posts/2023/12/how-has-chinas-belt-and-road-initiative-impacted-southeast-asian-countries?lang=en>
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Pemerintah Pusat. 2009. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Pemerintah Pusat. 2003. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Pemerintah Pusat. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya
- Pemerintah Pusat. 2022. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Pemerintah Pusat. 2023. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Pemerintah Pusat, Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing